

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *ASSET RECOVERY* DALAM PASAL
18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AKMAL KHALQI

201810110311063



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET RECOVERY DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AKMAL KHALOJ

201810110311063

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD AKMAL KHALQI

201810110311063

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

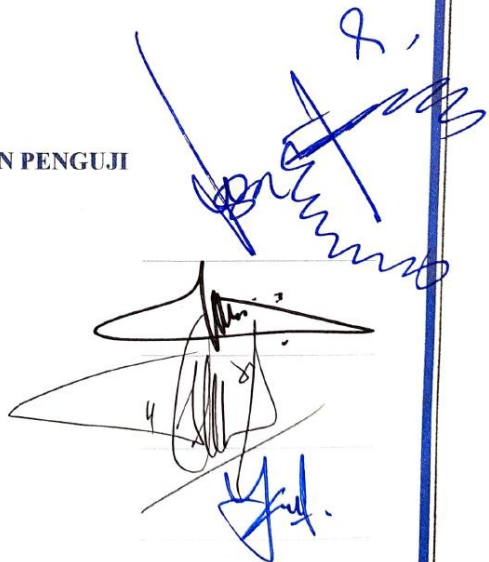
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD AKMAL KHALQI

NIM : 201810110311063

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET RECOVERY DALAM PASAL
18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

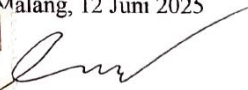
Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SA YA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

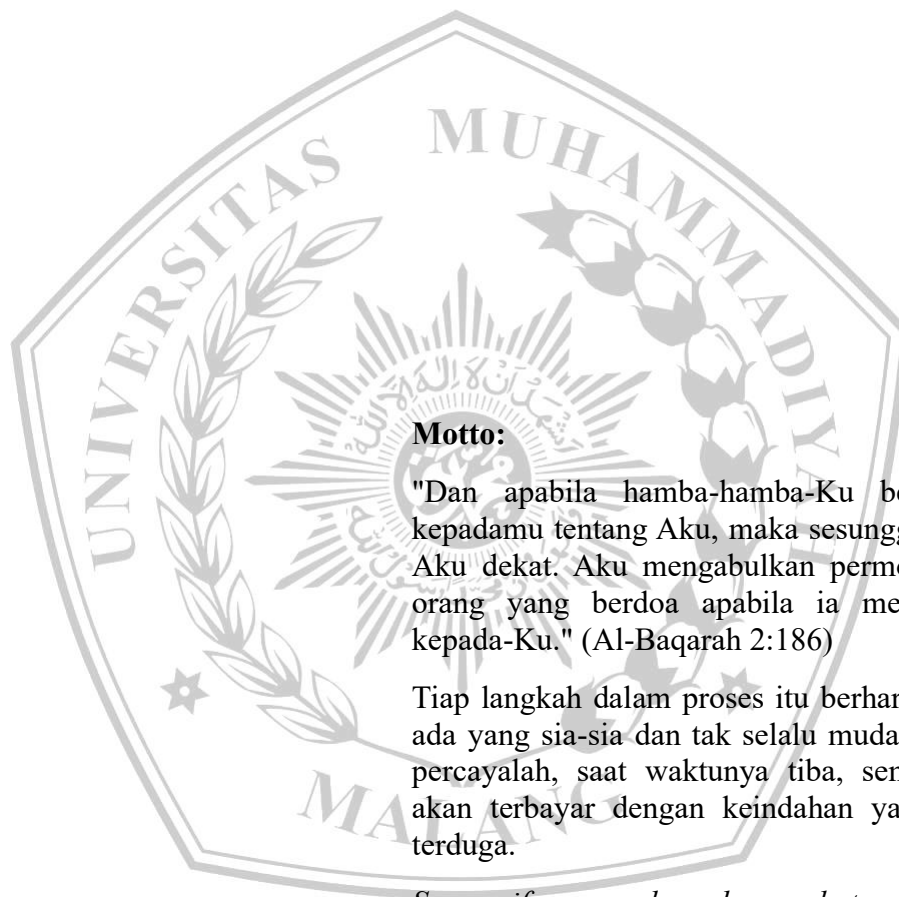
Malang, 12 Juni 2025




uhammad Akmal Khalqi

Ungkapan Pribadi:

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kemudahan dan bimbingan-Nya di setiap langkah yang saya tempuh hingga saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, serta doa yang tak pernah henti mengiringi perjalanan saya. Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para Dosen dan Pembimbing yang dengan sabar telah membagikan ilmu dan memberikan arahan selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat menjadi bekal berharga dalam menggapai impian dan memberi manfaat bagi banyak orang.



Motto:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku." (Al-Baqarah 2:186)

Tiap langkah dalam proses itu berharga, tak ada yang sia-sia dan tak selalu mudah. Tapi percayalah, saat waktunya tiba, semuanya akan terbayar dengan keindahan yang tak terduga.

So run if you need, grab your hat and fetch your camera, so film the world and be free, be the bird eyes.

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Akmal Khalqi
NIM : 201810110311063
Judul : Analisis Yuridis Pengaturan *Asset Recovery* Dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembimbing : (1) Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
(2) Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Asset recovery merupakan upaya penting dalam pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dengan cara menyita dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pasal 18 mengatur tentang kewajiban terpidana untuk membayar uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara, serta ketentuan penyitaan dan lelang harta benda terpidana jika uang pengganti tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Analisis ini mengkaji dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan dalam Pasal 18 dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan aset, dengan menyoroti potensi, tantangan dan kelemahan didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap aturan hukum melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan penelitian ini, meskipun Pasal 18 telah memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset, tantangan utama terletak pada kelemahan pasal yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4). Selain itu, efektivitas pelaksanaan penyitaan dan pengembalian aset, terutama dalam kasus-kasus dengan terpidana yang tidak memiliki harta yang cukup juga kian menambah kompleksitas dilapangan. Pengaturan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu untuk ditinjau dengan lebih komperhensif, karena Pasal ini lebih sering dijadikan sebagai sebuah pilihan. Pasal ini kemudian memunculkan potensi yang bisa memberikan kesempatan dan peluang bagi koruptor untuk tidak mengembalikan aset dengan cara menyembunyikan dan mengalihkan aset selama proses penuntutan. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap efektivitas dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian Aset, Tantangan

ABSTRACTION

Name : *Muhammad Akmal Khalqi*
NIM : *201810110311063*
Title : *Juridicial Analysis of Asset Recovery Arrangments in Article 18
Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes*
Adviser : *(1) Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum*
(2) Nu'man Aunuh,S.H., M.Hum

Asset recovery is an essential effort in recovering state losses caused by corruption crimes, by confiscating and returning assets obtained from the proceeds of crime. Article 18 regulates the obligation of the convicted person to pay restitution as a form of repayment of state losses, as well as the provisions for confiscation and auction of the convicted person's property if the restitution cannot be paid within the specified period. This analysis examines and evaluates the extent to which the provisions in Article 18 can contribute to asset recovery, by highlighting the potential, challenges and weaknesses therein. This research is normative research, which focuses on studying the rule of law through a statutory approach. Based on this research, although Article 18 has provided a legal basis for the recovery of state assets, the main challenge lies in the weakness of the article contained in Article 18 paragraph (4). In addition, the effectiveness of the implementation of confiscation and return of assets, especially in cases with convicts who do not have sufficient assets, also adds to the complexity of the field. The regulation in Article 18 of the Corruption Eradication Law needs to be reviewed more comprehensively because this article is more often used as an option. This article then raises the potential that can provide opportunities and opportunities for convicted corruptors not to return assets by hiding and transferring assets during the prosecution process, because the public prosecutor can only confiscate assets after a judge's decision. Overall, the evaluation of the effectiveness of Article 18 of the Corruption Eradication Law shows several weaknesses. This research is expected to contribute to efforts to increase the effectiveness of corruption eradication and state asset recovery in Indonesia.

Keywords: *Corruption, Asset Recovery, Challenges*

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya hingga saat ini. Pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET RECOVERY DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari, bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Bapak, Ibu dan Adik penulis yang menjadi sumber kekuatan dan penyemangat dalam perjalanan penulis meraih mimpi. Bapak dan Ibu adalah figur luar biasa yang telah membimbing, mendidik, dan menanamkan makna kehidupan serta arti dari sebuah perjuangan. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, nasihat yang menenangkan, dan dorongan yang selalu menguatkan di saat penulis menghadapi tantangan.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis. Berkat bimbingan, arahan, nasihat, dan kritik, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.H selaku dosen pembimbing II Penulis. Berkat bimbingan, arahan, masukan serta kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
4. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas segala ilmu, bimbingan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Teman-teman Penulis, Retno Meilanie, Adinda Sheila Amandita, Suci Rahmayanti, Khoirunnisa Almaas, Hafizh Anshari, Rizky Prasetyo, Naufal Saidani, yang telah membantu penulis dari segi moral serta menjadi penyemangat pada saat menyelesaikan tugas akhir.
6. Teman-teman dalam grup *Alwi Company*, Alwi, Billy, Fita, Hana, Mela, Shinta, Toni, Nanda, yang telah menyengamati dan kebersamai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Rizky Rahmahadian Pamungkas, terimakasih telah mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi dan terimakasih untuk karya-karya *master piece* nya seperti album *walk the talak*, *flying solo*, *solipsism 0.1*, *solipsism 0.2*, *birdy*, *hardcore romance* yang mana lagu-lagu

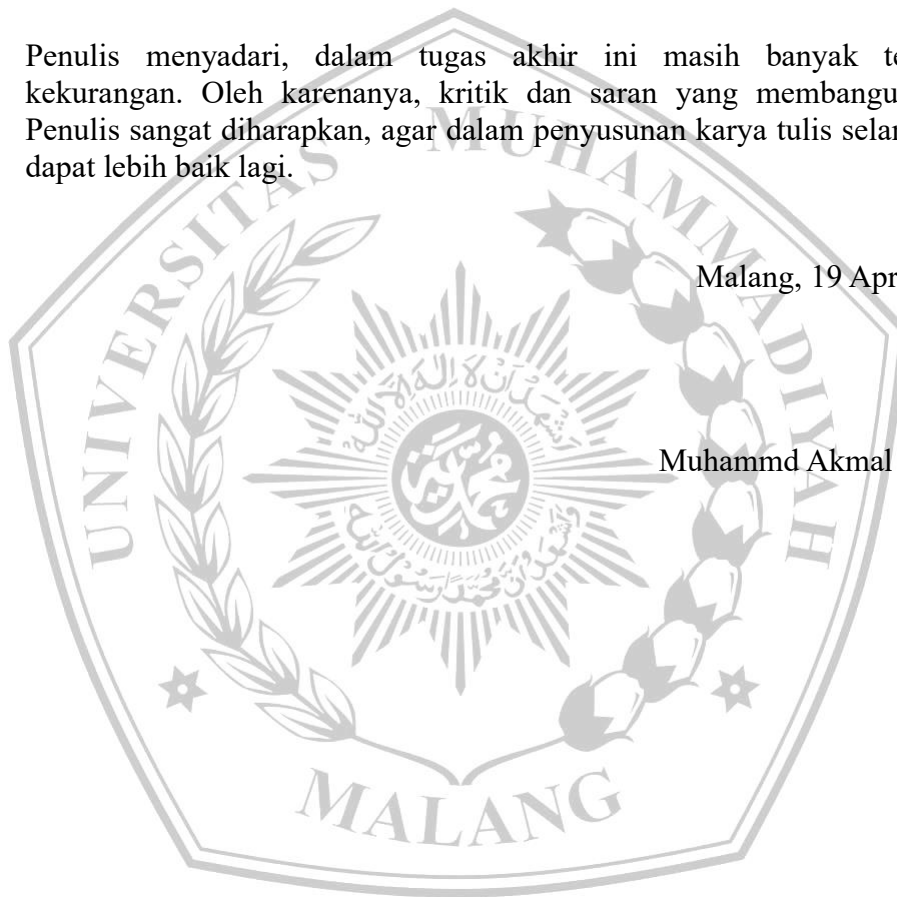
dari album tersebut sudah menemani penulis disaat mengerjakan skripsi maupun dikala gundah, atau senang.

8. Paduan Suara Mahasiswa GITASURYA UMM, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk memimpin, serta telah menjadi tempat penulis dalam belajar berorganisasi.
9. Ikatan Pelajar Mahasiswa Amuntai, terimakasih karena telah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi Penulis untuk berproses dan belajar dalam berorganisasi.
10. Penghuni Asrama Nagara Dipa. Terimakasih sudah menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk kembali pulang

Penulis menyadari, dalam tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun bagi Penulis sangat diharapkan, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Malang, 19 April 2025

Muhammd Akmal Khalqi



DAFTAR ISI

Lembar Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi	v
Abstraksi	vi
Abstraction	vii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Pustaka.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Korupsi	
1. Pengertian Korupsi	16
2. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	18
B. Tinjauan Umum Asset Recovery	
1. Pengertian Asset Recovery	22
2. Tinjauan Hukum Asset Recovery	24
3. Konsep Pemulihan Aset atau Asset Recovery	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Pengaturan Asset Recovery Dalam Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	31
B. Tantangan Proses Asset Recovery Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	50
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR DIAGRAM/TABEL

Trend Korupsi Sepanjang Tahun 2020- 2023	31
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir	56
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan	57
Lampiran 3. Golden Ticket	59



DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BUKU

Ade Mahmud. (2020). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Mohd. Yusuf Daeng. (2019). Korupsi dan Penindakannya. Pekanbaru: Taman Karya.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group)

JURNAL

Fuadi, G., Putri, W. V. and Raharjo, T. (2024). 'Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan', Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 5(1), pp. 53–68. doi: 10.18196/jphk.v5i1.19163.

Ibnu Artadi. (2006). 'Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Humanis'. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No.4

Jurnal Legislasi Indonesia. (2010). 'Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana'. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Vol 7 No.4. Diakses di http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/B6_ASSET_RECOVERY_ACT_SEBAGAI_STRATEGI.PDF pada 5 Januari 2025.

Mahmud, A. (2018). 'Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', Jurnal Yudisial, 11(3), p. 347. doi: 10.29123/jy.v11i3.262

Muabezi, Z. A. (2017) 'Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)', Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3), p. 421. doi: 10.25216/jhp.6.3.2017.421-446.

Nandha Risky Putra, & Rosa Linda. (2022). 'Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial'. Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1, 2022, pp. 13-24. Diakses di <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>

Noverdi Puja Saputra. (2023). 'Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset'. Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol. XV, No. 10/II/Pusaka/Mei/2023. Diakses di

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-2046.pdf

Ramadhana, K., & Anandya, D. (2024). 'Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023'. Indonesia Corruption Watch: Jakarta. Diakses di https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf

Rida Ista Sitepu, & Yusona Piadi. (2019). 'Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi'. Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.1. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>

WEBSITE

Guritno, T & Meiliana, D. (2021). ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun. Kompas.com. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567> pada 25 Januari 2025.

Guritno, T., & Ramadhan, A. (2024). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan. Kompas.com. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>. pada 25 Februari 2025.

Lihat KBBI mengenai "Definisi Korupsi". Diakses di <https://kbbi.web.id/korupsi> pada 5 Januari 2025.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Akmal Khalqi

Nim : 201810110311063

Dengan Judul Skripsi :


“ Analisis Yuridis Pengaturan Asset Recovery Dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 22 April 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum